

KATA PENGANTAR



Puji Kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun kelima dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2021 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada RENJA 2021 ini mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya, disamping itu juga merumuskan program/kegiatan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2021 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun Lalu, Tujuan sasaran Peangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja DPMPTSP tahun 2021 merupakan dokumen Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja DPMPTSP tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Tanjung Pati, Juli 2020

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Kepala



AMBARDI, SE.MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19631216 199003 1 005

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan kegiatan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan telah diubah dengan Undang –undang Nomor 2 Tahun 2015, telah diwajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Rencana Kerja OPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja OPD digunakan sebagai dasar pentusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang menjadi ddasar untuk pentusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan juga dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Rencana Kerja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikan dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga pentusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Pedoman kerja merupakan merupakan dokumen perencanaan kegiatan OPD Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2020.
3. RENJA merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA Perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA DPMPTSP Tahun 2021 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun Tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Landasan hukum penyusunan Renstra DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga.
12. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Terpadu.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 48).
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kethubungan dengan Renstra DPMPTSP dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2020 dan perencanaan program/kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA DPMPTSP Tahun 2021 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 meliputi:

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DPMPTSP TAHUN 2020**, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Aanalisa kinerja perangkat daerah.
- BAB III TUJUAN, SASARAN DPMPTSP**, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, Program dan keiatan di Tahun 2021.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP**, berisi rencana kerja Program dan kegiatan DPMPTSP tahun 2021, Rencana Kerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2021 RPJMD dan Renstra DPMPTSP, Rekapitulasi rencana pendanaan Perangkat daerah.
- BAB V PENUTUP**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA DPMPTSP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Renstra

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra DPMPTSP Tahun 2016-2021. Rencana Kerja juga merupakan alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akunabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan evaluasi pelaksanaan Kinerja Tahun 2019.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 2 (dua) urusan wajib, yaitu Urusan Penanaman Modal dan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2020.

Berdasarkan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.630.829.284,- dengan 98,30% keuangan sebesar 96,06% dari pagu anggaran Rp. 1.659.096.300,-.

Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA SKPD dan capaian RENSTRA SKPD diuraikan dalam pokok pokok materi sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Tidak ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang diencanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

A. Urusan Penanaman Modal

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. **Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**, alokasi dana Rp. 3.700.000,- Realisasi keuangan Rp. 3.680.000 (99,46%) dan Realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kelengkapan pendukung jasa surat menyurat, dengan Capaian Kinerja berupa terlaksananya aktifitas surat menyurat perkantoran.
2. **Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik**, alokasi dana Rp. 26.400.000,- Realisasi keuangan Rp. 21.568.125 (81,70%) dan Realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah adanya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik kantor dengan Capaian Kinerja berupa terlaksananya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik kantor.
3. **Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional**, alokasi dana Rp. 7.950.000 realisasi keuangan Rp. 6.130.000 (77,11%) dan realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya pengurusan STNK atas 5 unit mobil dinas/operasional dan 15 kendaraan dinas sepeda motor dengan Capaian Kinerja berupa terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional.
4. **Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**, alokasi dana Rp. 199.116.300,- Realisasi keuangan Rp.188.753.000,- (94,80%) dan Realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kelancaran penyelenggaraan administrasi keuangan pada sekretariat dan terbayarnya honor pengelola kegiatan, gaji dua orang pegawai tidak tetap dan gaji dua orang tenaga harian lepas dengan Capaian Kinerja berupa tertibnya administrasi keuangan kantor.
5. **Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**, alokasi dana Rp. 21.449.000,- Realisasi keuangan Rp. 21.084.000,- (98,30%) dan Realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kebersihan dan terpenuhinya pembayaran honor petugas kebersihan, Capaian Kinerja berupa teriptanya suasana kantor yang bersih dan nyaman.
6. **Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor**, alokasi dana Rp. 50.050.000,- Realisasi keuangan Rp. 50.050.000,- (100%) dan Realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor dengan Capaian Kinerja berupa terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran.
7. **Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan**, alokasi dana Rp. 71.742.000,- Realisasi keuangan 70.950.000,- (98,90%) dan Realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi

perkantoran dengan Capaian Kinerja berupa terlaksanannya kegiatan administrasi perkantoran.

8. **Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**, alokasi dana Rp. 14.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 13.948.559 (99,63%) dan Realisasi fisik 100% keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor dengan Capaian Kinerja berupa berfungsinya alat-alat listrik dan penerangan kantor.
9. **Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman**, alokasi dana Rp. 26.150.000,- Realisasi keuangan Rp. 26.052.500,- (99,63%) dan Realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya makan dan minuman tamu dan rapat pada DPMPTSP selama tahun anggaran 2019 dengan Capaian Kinerja berupa terlaksanannya rapat-rapat dan terlayannya tamu kantor.
10. **Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah**, alokasi dana Rp. 220.383.000,- Realisasi keuangan Rp. 220.377.160,- (100%) dan Realisasi fisik 100% keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi dengan Capaian Kinerja berupa teriptanya sinergi antar berbagai instansi.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. **Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**, alokasi dana Rp. 18.500.000,- Realisasi keuangan Rp. 18.500.000,-(100%) dan Realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah terlengkapinya perlengkapan gedung kantor dengan Capaian Kinerja berupa 9 unit kursi kerja, 4 unit kursi front office dan 1 kursi roda untuk disabilitas
2. **Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor**, alokasi dana Rp. 22.000.000,- Realisasi keuangan Rp.21.549.200,- (97,95%) dan Realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan gedung kantor dengan Capaian Kinerja berupa 2 Laptop/Note Book, 2 Printer/Ploter
3. **Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional** alokasi dana Rp.57.920.000,- realisasi keuangan Rp. 56.508.100,- (97,56%) dan Realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional operasional DPMPTSP dengan Capaian Kinerja berupa terpeliharanya kendaraan dinas operasional.

4. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor**, alokasi dana Rp. 6.000.000 realisasi keuangan Rp 6.000.000,- (100%) dan Realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor terdiri dari servis/perbaikan laptop, komputer, mesin tik dan *air conditioner (AC)* dengan Capaian Kinerja berupa terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran.
5. **Kegiatan Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor**, alokasi dana Rp. 48.000.000,- realisasi keuangan Rp. 47.587.199,- (99,14 %) dan Realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya terlaksananya Pengadaan bangunan tempat ibadah, pengadaan gedung tempat kerja lainnya.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. **Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal**, alokasi dana Rp. 30.000.000,- realisasi keuangan Rp. 40.495.10029.950.392,- (99,83%) dan realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah terikutinya bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai DPMPTSP yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. **Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**, alokasi dana Rp.30.503.000,- Realisasi keuangan Rp.30.351.000 (99,50%) dan Realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya DPA 2019, LKJIP Tahun 2019, PK Tahun 2019, Renja SKPD Tahun 2020, LKPJ Tahun 2019, LPPD Tahun 2019, RKA Tahun 2019, DPA Pergeseran Tahun 2019, Renstra Revisi 2016-2021 pada DPMPTSP dengan Capaian Kinerja berupa tersedianya dokumen anggaran dan bahan evaluasi.
2. **Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun**, alokasi dana Rp.7.020.000,- realisasi keuangan Rp.7.017.000,-(99,96%) dan realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan semester Tahun 2019 dan laporan keuangan akhir tahun 2019 DPMPTSP dengan Capaian Kinerja berupa tersedianya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun DPMPTSP yang akuntabel.

V. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. **Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah**, alokasi dana Rp.105.037.000,- Realisasi keuangan Rp. 104.935.140,- (99,90 %) dan Realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah 100 buah souvenir, 100 eks buku/leaflet,Rif/forum investmen, konsultasi dan koordinasi potensi investasi Kabupaten Lima Puluh Kota
2. **Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA**, alokasi dana Rp. 38.270.000,- Realisasi keuangan Rp. 38.260.000,- (97,58 %) dan Realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi Promosi dan Kerjasama Investasi dengan Capaian Kinerja berupa Terwujudnya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
3. **Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**, dengan alokasi dana Rp. 47.015.000,- realisasi keuangan Rp.45.561.300,- (96,91%) dan Realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal melalui Tim Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja berupa meningkatnya koordinasi pemantauan, pembinaan, pengawasan, dan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal di daerah dan terlaksananya pembinaan dan pengawasan secara berkala.
4. **Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi**, alokasi dana Rp. 141.955.000,- realisasi keuangan Rp. 141.719.416,- (99,83%) dan realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi ke BPM dan PPT provinsi Sumatera Barat persiapan rencana pelaksanaan pameran dalam negeri dengan Capaian Kinerja berupa terlaksananya promosi peluang investasi Kabupaten Lima Puluh Kota di Luar dan di Dalam Daerah.
5. **Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal**, alokasi dana Rp. 39.500.000,- Realisasi keuangan Rp. 38.900.000,- (98,48%) dan Realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal terhadap aparatur dan masyarakat pada 2 Nagari. Unsur peserta dalam sosialisasi ini terdiri Aparatur Kecamatan, Aparatur Nagari, Unsur dari BAMUS, Ketua KAN, Wali Jorong dan Pelaku Usaha.
6. **Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Promosi Investasi Daerah**, alokasi dana Rp.39.613.000,- realisasi keuangan Rp.38.036.000,- (96,02%) dan realisasi fisik 100%,

keluaran dari kegiatan ini adalah 1 buah rak brosur display, 3 rim brosur, sarana dan prasarana pameran, x banner/ y banner/roll banner, pembayaran honor THL

VI. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- 1. Kegiatan pengembangan system informasi penanaman modal**, alokasi dana Rp. 28.066.000,- realisasi keuangan Rp. 28.016.000,- (99,82%) dan realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengolahan data dan informasi di bidang penanaman modal sebanyak 19 laporan.
- 2. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daaerah**, alokasi dana Rp. 45.500.000,- Realisasi keuangan Rp. 45.374.200,- (99,50%) dan Realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah terimplementasikannya system pelayanan secara elektronik (4 sistem aplikasi perizinan) dengan Capaian Kinerja berupa meningkatnya Pelayanan Informasi dan Pelayanan Perizinan seara elektronik di Bidang Penanaman Modal.
- 3. Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Pelayanan Penanaman Modal**, alokasi dana Rp. 149.893.000,- realisasi keuangan Rp. 148.330.750,- (98,96%) dan realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan perizinan dan terlaksananya peninjauan lapangan terhadap usaha masyarakat yang mengajukan permohonan perizinan. Pada tahun 2019 dapat dilayani sebanyak 3.930 yang terdiri dari NIB 653 dan izin sebanyak 3.277, dengan Capaian Kinerja berupa Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perizinan di kabupaten lima puluh kota.
- 4. Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal**, alokasi dana Rp. 35.943.000,- Realisasi keuangan Rp. 35.939.993,- (99,99%) dan Realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembuatan Perbup pendelegasian wewenang pelayanan dan Perbup Persyaratan Perizinan Penanaman Modal dengan Capaian Kinerja berupa tersedianya pendelegasian wewenang pelayanan dan persyaratan perizinan penanaman modal.
- 5. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**, alokasi dana Rp. 52.030.000,- Realisasi keuangan Rp. 51.550.000,- (99,08%) dan Realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah adanya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal yang mencakup Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan Capaian Kinerja berupa tersedianya data realisasi investasi penanaman modal melalui pengumpulan data,verivikasi dan evaluasi LKPM.

6. **Kegiatan Operasional Pelayanan Investasi Daerah**, alokasi dana Rp. 58.027.000,- Realisasi keuangan Rp. 57.904.900,- (99,79%) dan Realisasi fisik 100% , keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Operasional Investasi Daerah untuk menunjang operasional Penyelenggaraan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dengan memfasilitasi calon investor dengan Capaian Kinerja berupa Terlayani dan terfasilitasi calon investor dalam pengurusan izin Penanaman Modal.

VII. **Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah**

1. **Kegiatan Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan investasi** , alokasi dana Rp. 15.214.000,- realisasi keuangan Rp. 15.214.000,- (100%) dan realisasi fisik 99,99 % , keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyusunan Data Potensi Investasi dengan Capaian Kinerja berupa Adanya Data Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 - a. Nilai rencana investasi mikro dan kecil dengan capaian 109,02% dari target 60M Realisasi Rp. 65M dan nilai rencana investasi menengah dan besar sebesar 141,55% dari target 300M realisasi 424M.
 - b. Nilai realisasi investasi Mikro dan kecil 130% dari target Rp 50M realisasi Rp 65M dan nilai realisasi investasi menengah dan besar sebesar 605% dari target kinerja Rp 70M realisasi Rp 424M
 - c. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 101,4% dari target B (80) realisasi B (81,17)
 - d. Nilai AKIP OPD sebesar 102,6% dari target 68 realisasi 69,08

4. Realisasi program/kegiatan yang tidak tercapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 - a. Jumlah investor PMA sebesar 0% dari target 1 investor
 - b. Jumlah investor PMDN (mikro kecil) 64,65% dari target 1010 investor realisasi 653 investor

5. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:
 - a. Jaminan stabilitas politik

Indek Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu persentase peningkatan nilai investasi, persentase peningkatan realisasi investasi, skor IKM. Untuk pencapaian target kinerja IKU dipengaruhi oleh faktor politik, karena usaha membutuhkan dunia politik stabil untuk merealisasikan rencana investasi dan hal ini juga akan berpengaruh untuk realisasi investasi.

- b. Keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti
Keamanan dan penegakan hukum yang konsisten mempengaruhi capaian kinerja karena investor akan ragu untuk berinvestasi di daerah kita

6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran pelayanan masyarakat Kabupaten Lima puluh Kota pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan

7. Kebijakan/tindakan perencanaan

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelaksanaan program/kegiatan
- d. Membuat regulasi dan kajian berupa Feasibility Study

Tabel. 2.1

Tabel evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lima Puluh Kota

Periode Pelaksanaan: 2019

Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	3	4	5		6		7		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatnya Nilai AKIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	98%	676.500.000	98%	925.566.157	98%	662.563.500	22,95 %	235.455.513	91,65 %	623.625.194				
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa komunikasi	1 Thn	4.500.000	12 bulan	5.360.000	12 bulan	12.603.000	3 bulan	1.380.000	12 bulan	3.680.500	24 bulan	9.040.500	60,00	2,009
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bln	50.000.000	12 bulan	66.193.031	12 bulan	45.000.000	3 bulan	5.650.094	12 bulan	21.568.125	24 bulan	87.761.156	60,00	1,755
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas / operasional	20 surat	15.000.000	12 bulan	7.872.500	12 bulan	10.000.000	3 surat	2.127.800	12 surat	7.161.350	24 bulan	15.033.850	60,00	1,002

	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah petugas pengadministrasian Keuangan	12 bln	250.000.000	12 bulan	337.486.000	12 bulan	200.000.000	3 bulan	51.856.000	12 bulan	188.753.000	24 bulan	526.239.000	60,00	2,105
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan petugas jasa kebersihan dan jumlah jenis peralatan pembersih	1 thn	26.000.000	12 bulan	29.052.000	12 bulan	20.000.000	3 bulan	6.514.000	12 bulan	21.084.000	24 bulan	50.136.000	60,00	1,928
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis penyediaan Alat tulis kantor	1 thn	34.000.000	12 bulan	57.575.000	12 bulan	64.443.500	3 bulan	8.451.400	12 bulan	50.050.000	24 bulan	107.625.000	60,00	3,165
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	12 bln	30.000.000	12 bulan	43.475.600	12 bulan	84.817.000	3 bulan	32.772.500	12 bulan	70.950.000	24 bulan	114.425.600	60,00	3,814
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat - alat listrik dan elektronik	12 bln	15.000.000	12 bulan	5.295.000	12 bulan	12.000.000	3 bulan	11.208.559	12 bulan	13.948.559	24 bulan	19.243.559	60,00	1,283
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	1 thn	17.000.000	12 bulan	18.465.500	12 bulan	73.813.000	3 bulan	14.350.000	12 bulan	26.052.500	24 bulan	44.518.000	60,00	2,619
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi	1 thn	235.000.000	12 bulan	354.791.526	12 bulan	139.887.000	3 bulan	101.145.160	12 bulan	220.377.160	24 bulan	575.168.686	60,00	2,448
Meningkatnya Mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	98%	135.000.000	98%	624.903.309	98%	144.420.000	21,81 %	51.203.700	87,24 %	150.144.499				
	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan roda 2 sebagai penunjang operasional DPMPPTSP	-	-	-	220.785.000	-	-	-	-	-	-				
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	3 Meja Kerja, 2 Kursi Kerja, 1 Lemari Arsip, 1 Filling Kabinet	19.000.000	7 kursi kerja	69.900.000	-	18.500.000	9 Kursi Kerja, 4 Kursi FO, 1 Kursi Roda	700.000	9 Kursi Kerja, 4 Kursi FO, 1 Kursi Roda	18.500.000	16 unit	88.400.000	26,67	4,653
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	1 Laptop/Note Book, 5 Printer / Ploter	28.000.000	2 laptop, 2 printer	77.329.459	2 laptop, 2 printer	22.000.000	2 laptop, 2 printer	21.549.200	2 laptop, 2 printer	21.549.200	4 unit	98.878.659	6,67	3,531
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	1 Thn	74.000.000	12 bulan	114.676.550	12 bulan	47.920.000	3 bulan	25.454.500	12 bulan	56.508.100	24 bulan	171.184.650	60,00	2,313

	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Service AC dan Mesin TIK	14.000.000	12 bulan	10.815.000	12 bulan	6.000.000	3 bulan	2.250.000	12 bulan	6.000.000	24 bulan	16.815.000	60,00	1,201
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Paket rehabilitasi gedung/kantor	-	-	4 paket	131.397.300	2 paket	50.000.000	2 paket	1.250.000	2 paket	47.587.199	2 paket	178.984.499	10,00	#DIV/0!
Meningkatnya Mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	98%	120.000.000	98%	82.700.000		0		0		0		0	0	0
	Pengadaan Mesin Absensi	Jumlah pengadaan mesin absensi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	60 stel	60.000.000	-	25.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	60 stel	60.000.000	-	57.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	98%	26000000	98%	30.390.500	98%	20.500.000	24,96 %	9.753.786	99,84 %	29.950.392				
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur pendidikan dan pelatihan formal	12 Orang	26.000.000	12 Orang	30.390.500	18 orang	20.500.000	1 Orang	9.753.786	7 Orang	29.950.392	18 orang	60.340.892	30,00	2,321
Meningkatnya Nilai AKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Pelaporan Kecapaian Kinerja dan Keuangan	98%	83.000.000	98%	134.844.450	98%	30.812.500	20,26 %	25.734.000	81,04 %	44.385.000				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, LKJIP, Renja, RKA, DPA, , LKPJ,LPPD, EKPPD)	9 Dokumen	65.000.000	9 Dokumen	112.238.950	9 Dokumen	24.077.000	4 Dokumen	22.426.000	9 Dokumen	37.368.000	9 Dokumen	149.606.950	30,00	2,302
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan Dinas akhir tahun	3 Laporan	18.000.000	3 Laporan	22.605.500	3 Laporan	6.735.500	1 Laporan	3.308.000	3 Laporan	7.017.000	3 Laporan	29.622.500	5,00	1,646
Meningkatnya Mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90(A)	328.000.000	98%	774.073.155	98%	254.460.000	24,69 %	61.517.550	98,76 %	251.609.850				
	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah Pelaksanaan Peninjauan lokasi dan Rakor Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk umum, mikro dan kecil	2200 izin usaha menengah dan besar	185.000.000	2000 izin	635.633.999	- 2000 izin usaha menengah dan kecil - 11 izin	152.368.000	650 izin usaha menengah, 4 izin usaha menengah	44.537.550	- 2000 izin usaha menengah dan kecil - 11 izin	148.330.750	450 izin usaha menengah, 1 izin usaha menengah dan besar	783.964.749	750,00	4,238

							usaha menengah dan besar		dan besar		usaha menengah dan besar					
	Operasional Pelayanan Investasi Daerah	Jumlah operasional pelayanan investasi daerah	Tim Teknis Perizinan-2200 Pelaku Usaha Mikro & Kecil- 22 Pelaku Usaha Menengah & Besar	75.000.000	26 Investor	37.082.500	- Tim Teknis Perizinan-2000 Pelaku Usaha Mikro & Kecil-20 Pelaku Usaha Menengah & Besar	56.492.000	600 pelaku usaha mikro, 10 pelaku usaha menengah dan besar	14.880.000	- Tim Teknis Perizinan-2000 Pelaku Usaha Mikro & Kecil-20 Pelaku Usaha Menengah & Besar	57.904.900	400 pelaku usaha mikro, 1 pelaku usaha menengah dan besar	94.987.400	666,67	1,266
	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah sistem informasi penanaman modal di daerah	4 sistem aplikasi	68.000.000	12 bulan	101.356.656	4 Sistem aplikasi perizinan	45.600.000	4 sistem aplikasi	2.100.000	4 sistem aplikasi	45.374.200	4 sistem aplikasi	146.730.856	6,67	2,158
Meningkatnya Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	580 Milyar	435.000.000	98%	371.220.479	98%	323.780.000	21,34%	121.083.986	85,36%	322.950.556				
	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah buku potensi unggulan daerah	100 buah souvenir, 100 eks buku/leaflet	130.000.000	X banner / Y banner, Spanduk/ Banner, Rotary Neon Bax, canvas rotary banner - tas souvenir -buku	188.587.850	100 buah souvenir, 100 eks buku/leaflet, Rif/ forum invest, koordinasi dan konsultasi	105.367.000	50 buah souvenir, 50 eks buku / leaflet	15.226.000	100 buah souvenir, 100 eks buku/leaflet, Rif/ forum invest, koordinasi dan konsultasi	104.935.140	100 buah souvenir, 100 eks buku/leaflet, Rif/ forum invest, koordinasi dan konsultasi	293.522.990	166,67	2,258

					potensi - film potensi investasi											
	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	Jumlah koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN / PMA	18 Investor	65.000.000	60%	-	10 Investor	38.270.000	1 Investor	5.005.000	10 Investor	38.260.000	10 Investor	38.260.000	16,67	0,589
	Peningkatan sarana prasana promosi investasi daerah	Jumlah pembuatan sapras dan bahan materi promosi	1 buah rak brosur display, 3 rim brosur, sarana dan prasarana pameran, x banner/ y banner/ roll banner, pembayaran honor THL	85.000.000	-	-	-	56.053.000	1 buah rak brosur display, 3 rim brosur, sarana dan prasarana pameran, x banner/ y banner/ roll banner, pembayaran honor THL	17.343.000	1 buah rak brosur display, 3 rim brosur, sarana dan prasarana pameran, x banner/ y banner/ roll banner, pembayaran honor THL	38.036.000	1 buah rak brosur display, 3 rim brosur, sarana dan prasarana pameran, x banner/ y banner/ roll banner, pembayaran honor THL	38.036.000	8,33	0,447
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah event pameran lokal maupun nasional	5 Pameran	155.000.000	1 kali pameran	182.632.629	2 Kali pameran investasi, 1 kali pameran pekan budaya	124.090.000	1 Kali pameran investasi	83.509.986	2 Kali pameran investasi, 1 kali pameran pekan budaya	141.719.416	2 Kali pameran investasi, 1 kali pameran pekan budaya	324.352.045	10,00	2,093

Meningkatnya Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	580 Milyar	95.000.000	98%	30.971.500	98%	35.943.000	23,97 %	6.714.000	95,88 %	35.939.993				
	Kajian Kebijakan penanaman modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	3 Kebijakan	95.000.000	5 Kebijakan	30.971.500	2 Kebijakan	35.943.000	-	6.714.000	5 Kebijakan	35.939.993	5 Kebijakan	66.911.493	16,67	0,704
Meningkatnya Investasi	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	120 Milyar	54.000.000	98%	0	98%	15.214.000	24,83 %	6.189.000	99,32 %	15.214.000				
	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Jumlah kajian tentang potensi daerah yang terkait investasi	1 Laporan	29.000.000	1 Dokumen	-	1 Laporan	15.214.000	1 Laporan	6.189.000	1 Laporan	15.214.000	1 Laporan	15.214.000	3,33	0,525
	Penyusunan Buku Statistik Investasi Daerah	Jumlah buku statistik investasi daerah	100 buku	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	160 Milyar, 3011 Investor	145.000.000	98%	276.041.305	98%	86.535.000	24,41 %	14.065.000	97,64 %	84.461.300				
	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	30 Investor	87.000.000	1 Laporan	149.336.305	20 Investor	47.015.000	4 Investor	3.800.000	20 Investor	45.561.300	20 Investor	194.897.605	33,33	2,240
	Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan penanaman modal	3 kecamatan	58.000.000	2 Nagari	126.705.000	3 Kecamatan	39.520.000	-	10.265.000	3 Kecamatan	38.900.000	6 Kecamatan	165.605.000	10,00	2,855
Meningkatnya Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	160 Milyar, 3011 Investor	105.000.000	98%	77.712.650	98%	81.846.000	24,27 %	20.859.000	97,16 %	79.566.000				
	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Jumlah pengembangan sistem informasi penanaman modal	19 Laporan	45.000.000	19 laporan	50.581.400	19 Laporan	29.666.000	7 laporan	7.349.000	19 Laporan	28.016.000	38 Laporan	78.597.400	63,33	1,747
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan Monev Perijinan	50 perusahaan	60.000.000	1 dokumen	27.131.250	50 Perusahaan	52.180.000	8 perusahaan	13.510.000	50 Perusahaan	51.550.000	50 Perusahaan	78.681.250	83,33	1,311

2.2 Capaian Renstra DPMPTSP

Tabel. 2.2

**Target Indikator sasaran
Renstra DPMPTSP Tahun 2016 - 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Nilai Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya investasi	Nilai Rencana Investasi (Milyar)					
			- Nilai Rencana Investasi Mikro dan Kecil	40	50	60	70	80
			- Nilai Rencana Investasi Menengah dan Besar	100	200	300	400	500
			Nilai Realisasi Investasi (Milyar)					
			- Nilai Realisasi Investasi Mikro dan Kecil	30	40	50	60	70
			- Nilai Realisasi Investasi Menengah dan Besar	50	60	70	80	90
			Jumlah Investor					
			- PMA	10	10	10	10	10
			- PMDN					
			- Mikro dan Kecil	1000	1500	2000	2500	3000

2	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	70 (B)	75 (B)	80 (B)	85 (A)	90 (A)
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan OPD	66	67	68	69	70

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2019 disajikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	Meningkatnya investasi	Nilai rencana investasi (Milyar)				
		- Nilai rencana investasi mikro dan kecil	60	65	109,02	Sangat Tinggi
		- Nilai Rencana Investasi Menengah dan besar	300	424	141,55	Sangat Tinggi
		Nilai realisasi investasi (milyar)				
		- Nilai realisasi investasi mikro dan kecil	50	65	130	Sangat Tinggi
		- Nilai realisasi investasi menengah dan besar	70	424	605,94	Rendah

		Jumlah investor - PMA - PMDN (Mikro kecil)	1 1010	0 653	0 64,65	Kurang Rendah
2	Meningkatnya mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Skor indeks kepuasan masyarakat	B (80)	B(81,17)	101,4%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP	Nilai AKIP OPD	68	69,08	102,6	Sangat Tinggi
Rata rata Capaian Indikator 156,46						

C. Analisis dan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Investasi

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian
1	Nilai rencana investasi (Milyar)						
	- Nilai rencana investasi mikro dan kecil	50	72,559	145,11	60	65,417	109,02
	- Nilai Rencana Investasi Menengah dan besar	200	3.526,3	1.763	300	424.676	141,558
	Rata-rata capaian nilai rencana investasi			146			179,80
	Nilai realisasi investasi (Milyar)						
	- Nilai rencana investasi mikro dan kecil	40	72,559	181,39	50	65,417	130,83
	- Nilai Rencana Investasi Menengah dan besar	60	35,233	58,72	70	42,416	60,59
	Rata-rata capaian realisasi investasi			210,75			161,13
	Jumlah Investor						
	- PMA	1	1		1	0	-
	- PMDN (Mikro,kecil)	1000	501		1500	653	44

	Rata rata capaian investor			125,05			22
--	----------------------------	--	--	---------------	--	--	-----------

1. Nilai Rencana investasi

Nilai investasi adalah suatu istilah yang berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan daerah masa yang akan datang (rencana). Angka diatas berdasarkan berdasarkan SIUP, Izin Prinsip, dan Nomor Induk Berusaha. Dari tabel diatas dapat dilihat, rata rata persentase capaian nilai rencana investasi Tahun 2018, 146%. Tahun 2019 sebesar 179,80%, meningkat 33,8%. Kegiatan yang mendukung meningkatnya nilai rencana investasi

2. Nilai Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah nilai dari laporan investor yang melaporkan kegiatan investasinya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara triwulan dan semester.

Nilai Realisasi investasi tahun 2019 161,13%. Tahun 2018 210,75%. Hal ini terjadi penurunan sebesar 49,62 % hal ini diperngaruhi oleh bebarapa hal :

1. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disampaikan oleh investor.
2. Sistem pelaporan, dari manual ke on-line. Bila masyarakat/investrot lebih paham maka akan dapat meningkat kan nilai realisasi investasi
3. Akses bagi investor untuk menyampaikan LKPM, dimana sampai saat ini belum ada hak akses investor untuk akses ke LKPM. Kegiatan yang mendukung meningkatnya nilai ealisasi investasi.

3. Jumlah Investor

Pada Tahun 2018 jumlah investor PMA 1, PMDN 501. Tahun 2019 investor PMA 0, PMDN 653 investor. Hal ini disebabkan oleh karena beberapa hal :

1. Jaminan stabilitas politik.
2. Keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti.

Dan yang menjadi factor penghambat bagi investor untuk menanamkan modalnya adalah : Kesulitan investor untuk mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya mutu pelayanan perizinan dan non perizinan

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
1	Skor IKM	78	81,10	80	81,17	Nilai

a. Indikator Kinerja 1 :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran pendapat masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini merupakan tolok ukur evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan untuk masa berikutnya. Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pencapaian Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 mencapai nilai skor **81,17** dari target nilai capaian yang ditetapkan sebesar **81,10**. Ini berarti skor capaian dari target yang ditetapkan tahun 2019 mencapai **1,014%**, yang menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 berada dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPSTP

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
1	Nilai AKIP OPD	67	69,9	68	69,08	Nilai

Dalam penilaian akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan memperhatikan beberapa indikator penilaian dan bobot. Bobot dan Nilai DPMPSTP Tahun 2019 sebagai berikut :

No.	Indikator Penilaian	Bobot%	Nilai %
1	Perencanaan kinerja	30	23,17
2	Pengukuran kinerja	25	13,75
3	Pelaporan kinerja	15	9,67
4	Evaluasi internal	10	5,50
5	Pencapaian sasaran/kinerja organisasi	20	17,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa total nilai DPMPSTP = 69,08 (B).

Dilihat dari tabel diatas maka rata-rata capaian 5 indikator kinerja sasaran strategis sebesar **69,08** Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan yang ditetapkan, pencapaian sasaran ini termasuk berhasil dengan kategori penilaian B .

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPSTP Kabupaten Lima Puluh Dalam menyelenggarakan tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Lima Puluh Kota, DPMPSTP Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
2. Pembinaan dan Pengkoordinasian penerapan standar teknis Perizinan Terpadu;
3. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang penanaman modal;
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
5. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;

6. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada DPMPTSP lebih difokuskan pada pelayanan administrasi perizinan yang dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan nilai investasi dan realisasi investasi yang kinerjanya diukur diukur dari peningkatan nilai investasi dan peningkatan realisasi investasi setiap tahunnya, baik itu dari segi prosentase pertumbuhan jumlah PMA dan PMDN dari tahun ke tahun. Kinerja DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota juga dapat diukur dari pelayanan yang diberikan kepada investor baik dalam proses perizinan dan non perizinan maupun dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam merealisasikan investasinya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tolok ukur kinerja lainnya adalah dalam pelayanan perizinan yang diberikan kepada investor yang diukur dengan Idek Kepuasan Masyarakat.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota

- a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Belum optimalnya sinergitas, integrasi, dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- c. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan yang didukung oleh e-service;

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan terhadap capaian nasional/internasional.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa”

Visi Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, memperhatikan RPJMN 2015-2019, RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025, dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tantangan sebagai berikut :

- a. Kebutuhan sarana prasarana yang representatif dalam upaya pencapaian optimalisasi pelayanan
- b. Dinamisasi dalam proses penguatan dan penyederhanaan operasional prosedur dalam upaya pencapaian percepatan pelayanan perizinan
- c. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia dibidang pelayanan dan pemahaman teknologi
- d. Pemutakhiran instrumen dan data data dan regulasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan di DPMPTSP

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Tingginya dukungan pemerintah terhadap penyederhanaan sisten pelayanan dalam investasi
- b. Iklim usaha yang kondusif untuk memberikan peluang pada masuknya investasi
- c. Posisi geografis yang strategis dan terbangunnya infrastruktur transportasi di daerah yangh baik
- d. Dukungan komitmen peningkatan pelayanan dari pimpinan dan seluruh jajaran aparatur pelayanan daerah dan dukungan pemerintah
- e. Struktur kelembagaan yang lebih kondusif dan akomodatif terhadap perkembangan perizinan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Kabupaten Lima Puluh Kota

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				31.835.600
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Kebijakan di Bidang Penanaman Modal sebanyak 2 Kebijakan	2 kebijakan	75.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Kebijakan di Bidang Penanaman Modal sebanyak 2 Kebijakan	2 kebijakan	31.835.600
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				-	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				65.551.600

	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Tersedia nya peta dan peluang usaha	-	-	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Tersedia nya peta dan peluang usaha	1 dokumen	65.551.600
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				185.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				200.608.200
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Lima Puluh Kota	- Jumlah buku promosi produk unggulan. - Jumlah souvenir promosi produk unggulan	100 buku. 100 souvenir	60.000.00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Lima Puluh Kota	- Jumlah buku promosi produk unggulan. - Jumlah souvenir promosi produk unggulan	100 buku. 100 souvenir	64.802.200
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pameran investasi Jumlah pameran pekan budaya dalam rangka mendukung potensi produk unggulan daerah	3 kali. 1 kali	125.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pameran investasi Jumlah pameran pekan budaya dalam rangka mendukung potensi produk unggulan daerah	3 kali. 1 kali	135.806.000
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				235.000.000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				212.748.000
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Lima Puluh Kota	Pemanfaatan aplikasi perizinan elektronik berbasis teknologi informasi dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku	2 aplikasi	55.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Lima Puluh Kota	Pemanfaatan aplikasi perizinan elektronik berbasis teknologi informasi dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku	2 aplikasi	49.464.000
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelayanan perizinan dan nonperizinan terhadap pelaku usaha skala usaha mikro/kecil dan skala	3000 dokumen	140.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelayanan perizinan dan nonperizinan terhadap pelaku usaha skala usaha mikro/kecil dan skala investasi (menenga	3000 dokumen	125.364.000

			investasi (menengah/besar) yang memuaskan					h/besar) yang memuaskan		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi terhadap tim teknis	24 orang	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi terhadap tim teknis	24 orang	37.920.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				122.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				101.470.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pemantauan investor pelaksanaan penanaman modal DPMPTSP	30 investor	65.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pemantauan investor pelaksanaan penanaman modal DPMPTSP	30 investor	63.310.000
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengawasan investor pelaksanaan penanaman modal	50 perusahaan	57.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengawasan investor pelaksanaan penanaman modal	50 perusahaan	38.160.000

	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25.000.00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				16.215.000
	Pengolahan. Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan	19 laporan	25.000.00	Pengolahan. Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan	19 laporan	16.215.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				55.500.00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				55.500.000
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Dokumen Renstra dan Renja DPMPTSP	2 dokumen	30.000.00	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Dokumen Renstra dan Renja DPMPTSP	2 dokumen	30.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Dokumen Sakip. Monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	6 dokumen	25.500.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Dokumen Sakip. Monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	6 dokumen	25.500.000
	Administrasi Keuangan				3.884.045.505	Administrasi Keuangan				3.826.545.505

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Fasilitasi pemberian gaji . tunjangan dan insentif ASN	12 bulan	3.80 1.04 5.50 5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota	Fasilitasi pemberian gaji . tunjangan dan insentif ASN	12 bulan	3.801.045.505
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Tersusunnya laporan kinerja SKPD	9 dokumen	65.0 00.0 00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota	Tersusunnya laporan kinerja SKPD	9 dokumen	10.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kab. Lima Puluh Kota	- Tersusunnya laporan keuangan bulanan /semesteran. - Tersusunnya laporan keuangan bulanan / semesteran	2 bulan. 12 bulan	-	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kab. Lima Puluh Kota	- Tersusunnya laporan keuangan bulanan /semesteran. - Tersusunnya laporan keuangan bulanan / semesteran	2 bulan. 12 bulan	5.000.000
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota	Tersusunnya laporan prognosiss dan realisasi anggaran	1 laporan	-	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota	Tersusunnya laporan prognosiss dan realisasi anggaran	1 laporan	5.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Lima Puluh Kota	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	18.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Lima Puluh Kota	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	5.500.000
Administrasi Umum				640.600.000	Administrasi Umum				847.142.294
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Lancarnya administrasi perkantoran	12 bulan	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota	Lancarnya administrasi perkantoran	12 bulan	4.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Lancarnya pembayaran rek. Telepon. listrik dan internet	12 bulan	38.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota	Lancarnya pembayaran rek. telepon. listrik dan internet	12 bulan	39.600.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya pembayaran surat surat kendaraan dinas	20 surat	6.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya pembayaran surat surat kendaraan dinas	20 surat	15.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota	Bertambahnya motivasi dan semangat untuk bekerja	12 bulan	182.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota	Bertambahnya motivasi dan semangat untuk bekerja	12 bulan	192.050.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Terciptanya suasana Kantor yang Bersih	12 bulan	21.000.00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Terciptanya suasana Kantor yang Bersih	12 bulan	24.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Lancarnya proses pengadaan alat tulis kantor	12 bulan	34.000.00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Lancarnya proses pengadaan alat tulis kantor	12 bulan	46.372.294
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Lancarnya proses pembiayaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	27.000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota	Lancarnya proses pembiayaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	36.140.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Berfungsinya Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor	12 bulan	5.000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Berfungsinya Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor	12 bulan	8.040.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Makan Minum Rapat dan terlayannya tamu	12 bulan	14.000.00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedianya Makan Minum Rapat dan terlayannya tamu	12 bulan	17.000.000

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedia dana untuk koordinasi dan konsultasi	12 bulan	174.000.000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedia dana untuk koordinasi dan konsultasi	12 bulan	185.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedia Kursi Kerja tersedia Meja Kerja	2 unit. 4 unit	19.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Tersedia Kursi Kerja tersedia Meja Kerja	2 unit. 4 unit	75.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	tersedia laptop tersedia printer	1 unit. 5 unit	28.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	tersedia laptop tersedia printer	1 unit. 5 unit	19.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara	20 unit	74.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara	20 unit	84.340.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	14.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	16.100.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya sarana dan prasarana penunjang	1 paket	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya sarana dan prasarana penunjang fasilitas kantor	1 paket	85.000.000

			fasilitas kantor							
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				146.000.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				116.095.600
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	52 stel	60.000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	52 stel	30.000.000
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pengadaan pakaian Khusus hari hari tertentu	52 stel	60.000.00	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kab. Lima Puluh Kota	Terlaksananya pengadaan pakaian Khusus hari hari tertentu	52 stel	30.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10 orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Lima Puluh Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10 orang	30.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait	8 nagari	26.000.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Investasi	8 nagari	26.095.600

			dengan Investasi							
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia 2015–2019, maka Visi BKPM RI adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja periode 2015-2019 yaitu: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Misi Kabinet Kerja yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM yaitu:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 sebagai berikut:

Tujuan 1 : Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
3. Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM.

Tujuan 2 : Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
2. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal.
3. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
4. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas.

BKPM RI menetapkan serangkaian tujuan di atas sebagai panduan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana operasional lembaga. Selain itu, tujuan di atas juga berperan sebagai acuan bagi lembaga lain, terutama DPMPTSP daerah untuk merumuskan rencana dan kebijakan regional agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BKPM RI dapat digambarkan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan DPMPTSP berdasarkan Sasaran Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti	Kesulitan investor untuk mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai.	Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Belum semua penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan (masih memakan waktu lama)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua OPD mendukung penuh terkait PTSP - Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu belum optimal - Sarana dan prasarana yang masih belum tersedia secara memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat keputusan Bupati mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada kepala DPMPTSP memungkinkan organisasi lebih fleksibel dalam proses perizinan - Komitmen pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI	Permasalahan Pelayanan DPMPSTP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai	Penambahan pegawai belum dapat dipenuhi oleh BKD sesuai kebutuhan	- Sudah adanya Standar Pelayanan Publik dan SOP terkait perizinan dan non perizinan Sarana pendukung yang tersedia di DPMPSTP cukup memadai
4	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM	Anggaran terbatas dalam melakukan pengendalian dan pengawasan	Adanya Pemanfaatan TI dalam melakukan pengendalian dan pengawasan
5	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal	Anggaran promosi investasi yang terbatas	Adanya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melakukan Promosi
6	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara BKPM RI, DPMPSTP Provinsi dan DPMPSTP Kabupaten/kota belum optimal	Struktur organisasi di daerah masih belum sesuai dengan peraturan perundang undangan	Sudah adanya aturan pusat terkait organisasi Perangkat Daerah bidang penanaman Modal

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan pada tugas dan fungsi DPMPSTP Tahun 2016–2021 serta Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdapat dalam RPJMD maka dirumuskanlah Visi dan Misi DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat. Adapun Visi yang telah ditetapkan, dinyatakan sebagai berikut : **“Menjadikan Sumatera Barat sebagai Daerah Tujuan Investasi yang Menarik, Unggul, dan Berdaya Saing”**

Visi DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat yang dijelaskan di atas selaras dan didukung oleh beberapa Misi organisasi. Misi juga merupakan rumusan umum mengenai aktifitas utama

yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi dalam rangka institusi. Misi DPMPTSP yang telah ditetapkan adalah :

1. Mendukung terwujudnya peningkatan daya tarik investasi di Sumatera Barat;
2. Meningkatkan pelayanan investasi yang berkualitas.

Beberapa misi yang telah ditetapkan di atas merupakan prioritas aktifitas yang akan dilakukan secara terus-menerus oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat.

Untuk menjelaskan dan menjabarkan visi kedalam bentuk yang lebih terukur, perlu disusun serangkaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun beberapa tujuan yang telah dirumuskan adalah:

1. Meningkatkan perbaikan iklim investasi dan mengoptimalkan kapasitas lembaga.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara inovatif dan profesional.

Tujuan yang telah dirumuskan di atas disusun dengan memperhatikan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta searah dengan visi dan misi institusi. Berbagai tujuan di atas digunakan sebagai panduan dalam merencanakan sasaran dan program yang akan disusun.

Sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016-2021 adalah:

1. Meningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat;
2. Meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat;
3. Meningkatnya kenyamanan berusaha bagi investor;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu.

3.1.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 ditetapkan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu Sejahtera, Dinamis, “Mantap”, serta Iman dan Taqwa. Sejahtera adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dinamis adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan. Mantap adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran.

Sedangkan Iman dan Taqwa merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan mendatangkan kemashlahatan dan keberkahan tanpa dilandasi oleh iman dan taqwa. Suatu capaian pembangunan dapat menjadi tidak bermakna tanpa dilandasi kehidupan masyarakat yang penuh berkah dan ampunan dari Tuhannya. Oleh karena itu, pembangunan yang diarahkan untuk mencapai rakyat yang sejahtera dan dinamis yang “mantap” itu harus dilandasi oleh Iman dan Taqwa sebagai ruh-nya.

Iman dan taqwa dapat diukur dari semakin baiknya etika dan moral masyarakat berdasarkan norma agama, norma hukum, norma adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, yang tercermin pula dari kualitas kehidupan beragama serta kerukunan diantara umat beragama/antar umat beragama dan semakin kokohnya pelaksanaan filosof “Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah”.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Disamping itu, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik daerah terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang ‘mantap berlandaskan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan kedalam 11 agenda prioritas pembangunan antara lain :

1. Revolusi mental
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Investasi dan kemudahan berusaha
5. Penguatan ekonomi kerakyatan
6. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia.
7. Reformasi birokrasi
8. Penguatan nagari
9. Penataan ruang dan kawasan strategis
10. Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
11. Pengembangan daerah basis perjuangan

RPJPD 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang setiap tahunnya memiliki rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMD ke-3 (2016-2021) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian utamanya agribisnis berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta penerapan IPTEK secara luas. Bidang pembangunan yang dirumuskan dalam RPJPD tersebut adalah:

1. Pembangunan budaya
2. Pembangunan Hukum dan Tata-Pemerintahan
3. Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia
4. Pembangunan Ekonomi dan Kegiatan Agribisnis Terpadu
5. Pembangunan sarana dan prasarana.
6. Penataan ruang dan lingkungan hidup.

Jika ditinjau lebih jauh terhadap substansi dari bidang-bidang pembangunan tersebut, akan terlihat bahwa visi dan misi yang dirumuskan dalam RPJMD ini sangat serasi dan mendukung sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJPD 2016-2021, terutama arahan pembangunan daerah pada periode ke-3 dari RPJPD tersebut.

Untuk mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil dengan investasi yang kondusif, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah yang terletak dengan posisi strategis perlu mewujudkan pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam. DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota berusaha menarik investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya yaitu dengan memberikan informasi tentang potensi penanaman modal, pemberian pelayanan perizinan prima untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi dalam penyiapan pengembangan berbasis ekonomi kerakyatan.

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja DPMPTSP

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana kerja DPMPTSP Tahun 2018 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA DPMPTSP tahun 2016-2021 yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu-isu strategis penanaman modal. Adapun misi tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 seperti tabel berikut.

Tabel 3.2

Misi, Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP

MISI	TUJUAN	SASARAN
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.	Mewujudkan Iklim Investasi yang kondusif;	Meningkatnya daya tarik investasi;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal dan Berkualitas.	Penyediaan Mutu Layanan yang berbasis standar pelayanan Publik.

Selain merupakan penjabaran Renstra DPMPTSP, maka Renja DPMPTSP tahun 2020 juga akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (RKPD) Tahun 2020. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan DPMPTSP.

Pada beberapa tahun terakhir, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPM-PTSP Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan layanan mandiri, perbantuan dan prioritas dalam proses pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submissian (OSS) berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018
2. Belum tersedianya SOP dan SP pelaksanaan perizinan elektronik
3. Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizininan satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP;
4. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan investasi daerah serta kajian dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik;

5. Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (master plan, feasibility study, DED, business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai;
6. Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. Promosi yang dilakukan sampai sekarang masih berbentuk insidentil dengan perspektif jangka pendek dan taktikal. Pendekatan promosi secara strategis dan berkelanjutan diperlukan terutama dalam menjelaskan potensi menyeluruh berkaitan dengan berbagai sektor potensial yang bisa menjadi tawaran kepada calon investor;
7. Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran Investor dalam menyampaikan LKPM. Kondisi ini juga memperburuk sistem akuntabilitas publik aparatur berkaitan dengan aktivitas investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota;
8. Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti. Lemahnya penegakan hukum terutama yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga menjadi salah satu kendala yang menurunkan intensi investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Keterbatasan sumberdaya keuangan daerah, dan karena berbagai alasan prioritas pembangunan lainnya belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP

4.1. Program dan Kegiatan Tahun 2021

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2021 disusun berdasarkan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;
- c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan DPMPTSP

Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2021 direncanakan berjumlah 6 Program dan 9 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 5.473.711.798,88

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu meningkatkan nilai investasi dan realisasi investasi dan meningkatkan Indeks Kepuasan . Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan diarahkan pada perencanaan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, administrasi keuangan, administrasi umum, peningkatan disiplin dan pengembangankapasitas sumber daya aparatur Perangkat Daerah . Program ini diarahkan pada capaian indikator kinerja Meningkatnya nilai LAKIP dan Skor IKM dengan target capaian 70,99 (A)
- f. Program Promosi Penanaman Modal. Kegiatan diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota dengan indicator kinerja peningkatan nilai rencana investasi dengan target capaian rencana investasi mikro kecil 80 milyar, menengah besar 500 milyar
- g. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Kegiatan ini diarahkan pada Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja rencana investasi mikro kecil 80 milyar, menengah besar 500 milyar

- h. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Program ini kegiatannya diarahkan pada penetapan pemberian fasilitas /insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota dengan indicator kinerja peningkatan nilai rencana investasi mikro kecil 80 milyar, menengah besar 500 milyar
- i. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal . Kegiatan diarahkan pada pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan indicator kinerja peningkatan nilai rencana investasi dan peningkatan nilai realisasi investasi dengan target capaian nilai rencana investasi mikro kecil 80 milyar, menengah besar 500 milyar dan nilai realisasi investasi mikro kecil 70 milyar dan menengah besar 90 milyar.
- j. Program Pelayanan Penanaman Modal . Kegiatan diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan indicator kinerja peningkatan jumlah investor dan target capaian PMA 1, PMDN 10 , mikro kecil 3.000.

Guna tercapainya target indikator tersebut, terlampir Rencana Kerja Program dan Kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif tahun 2021 serta perkiraan maju tahun 2022 sebagaimana tabel 4.1

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022

TABEL TC.33

Revisi Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

OPD : DINAS PENANAMAN MKDAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Jt)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Jt)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Skor IKM		980/0	499				559
		Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya administrasi perkantoran	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 bulan	4	DAU	Rutin OPD	1 Tahun	4,5
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 bin	38	DAU	Rutin OPD	12 bin	38,5
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pembayaran surat surat kendaraan dinas	Kabupaten Lima Puluh Kota	20 surat	6.6	DAU	Rutin OPD	24 surat	7
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bertambahnya motivasi dan semangat untuk bekerja	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 bulan	182	DAU	Rutin OPD	12 bulan	182
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lancarnya proses pengadaan alat tulis kantor	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 bulan	21	DAU	Rutin OPD	1 Tahun	21

		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya proses pengadaan alat tulis kantor	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 bulan	34	DAU	Rutin OPD	1 Tahun	36
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya proses pembiayaan barang cetak dan penggandaan	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 bulan	27	DAU	Rutin OPD	12 bulan	27,5
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Berfungsinya Alat-alat Listrik dan Penerangan Kantor	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 bulan	5	DAU	Rutin OPD	12 bulan	6
		Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Rapat-rapat dan terlayannya tamu	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 bulan	14	DAU	Rutin OPD	1 Tahun	16
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 bulan	174	DAU	Rutin OPD	1 Tahun	220
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	Kabupaten Lima Puluh Kota	98%	135	DAU	Rutin OPD	98%	758
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan roda 2 sebagai penunjang operasional DPMTSP	Kabupaten Lima Puluh Kota		-	DAU	Rutin OPD	1 kendaraan roda 4, 4 kendaraan roda 2	350
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Lima Puluh Kota	3 meja kursi, 2 kursi kerja, 1 lemari arsip, 1 filling kabinet	19	DAU	Rutin OPD	3 meja kursi, 2 kursi kerja, 1 lemari arsip, 1 filling kabinet	20
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 laptop/note book, 3 printer/ploter	28	DAU	Rutin OPD	1 laptop/note book, 3 printer/ploter	30
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Tahun	74	DAU	Rutin OPD	1 Tahun	78

		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kabupaten Lima Puluh Kota	Service AC	14	DAU	Rutin OPD	Service AC	30
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya sarana dan prasarana penunjang fasilitas kantor	Kabupaten Lima Puluh Kota		-	DAU	Rutin OPD		250
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			120	DAU	Rutin OPD	1 Tahun	130
		Pengadaan Mesin Absensi	Jumlah pengadaan mesin absensi	Kabupaten Lima Puluh Kota		-	DAU	Rutin OPD		-
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kabupaten Lima Puluh Kota	60 stel	60	DAU	Rutin OPD	65 stel	65
		Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Kabupaten Lima Puluh Kota	60	60	DAU	Rutin OPD	65 stel	65
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kabupaten Lima Puluh Kota	980/0	26	DAU	Rutin OPD	98%	50,0
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 orang	26	DAU	Rutin OPD	15 orang	50
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya nilai LAKIP	Kabupaten Lima Puluh Kota		83	DAU			90
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	9 dokumen	65	DAU	IKU OPD	9 dokumen	70
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Kabupaten Lima Puluh Kota	3 laporan	18	DAU	IKU OPD	3 laporan	20

		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan nilai Investasi	Kabupaten Lima Puluh Kota	90(A)	180	DAU		95%	295
		Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah Pelayanan perizinan dan nonperizinan terhadap pelaku usaha skala usaha mikro/kecil dan skala investasi (menengah/besar) yang memuaskan	Kabupaten Lima Puluh Kota	3000 dokumen	140	DAU	IKU OPD	220	220
		Operasional Pelayanan Investasi Daerah	Terfasilitasinya operasional tim teknis dalam pelayanan investasi	Kabupaten Lima Puluh Kota	24 orang	40	DAU	IKU OPD	Tim Teknis(2200 pelaku usaha mikro dan kecil, 22 pelaku usaha menengah dan besar	75
Meningkatkan Nilai Investasi dan Reallsasi Investasi	Meningkatnya daya Tarik Investasi yang maksimal	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Investasi, Jumlah Investor, Jumlah kerjasama Investasi antara pemerintah dengan dunia usaha dan jumlah UMKM yang bermitra,	Kabupaten Lima Puluh Kota		282	DAU		1 Tahun	640
		Pengembangan potensi unggulan daerah	1.Jumlah souvenir promosi priduk unggulan. 2. jumlah buku promosi produk unggulan	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 buah souvenir,100 bh eks buku/laflet	60	DAU	IKU OPD	100 buah souvenir,100 bh eks buku/laflet	200
		Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	Jumah koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi	Kabupaten Lima Puluh Kota	18 investor	42	DAU	IKU OPD	20 investor	80

		Pembuatan Sarana/Prasarana dan Bahan/Materi Promosi Investasi	1 Ruang Pojok Promosi, 1 buah anjungan informasi digital	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 buah rak brosur,sarana dan prasarana pameran,xbanner/ y banner/rollbanner, pembayaran honor	55	DAU	IKU OPD	1 buah rak brosur,sarana dan prasarana pameran,xbanner/ y banner/rollbanner, pembayaran honor	110
		Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi , umlah pamean pekan budaya dalam rangka mendukung potensi produk unggulan daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	3 kali pameran investasi, 1 kali pameran budaya	125	DAU	IKU OPD	6 pameran (5 kali Dalam negeri /daerah, 1 kali luar negeri	250
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi, Jumlah investor, nilai realisasi investasi	Kabupaten Lima Puluh Kota	580 milyar	75	DAU		1 Tahun	100
		Kajian Kebijakan penanaman modal	Tersedianya Kebijakan di Bidang Penanaman Modal sebanyak 2 Kebijakan	Kabupaten Lima Puluh Kota	2 kebijakan	75	DAU	IKU OPD	3 kajian	100
		Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Jumlah profil peluang investasi unggulan daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 dokumen	25	DAU		120 milyar	350
		Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Jumlah profil peluang investasi unggulan daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	120 milyar	25	DAU	IKU OPD	1 laporan FS	250
		Penyusunan Buku Statistik Investasi Daerah	Jumlah buku statistik investasi daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	100 buku	-	DAU	IKU OPD	100 buku	100

		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai investasi, Jumlah investor, Jumlah kerjasama Investasi antara pemerintah dengan dunia usaha dan Jumlah UMKM yang bermitra,	Kabupaten Lima Puluh Kota	160 milyar,3011 investor	110	DAU		160 milyar,3011 investor	370
		Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kabupaten Lima Puluh Kota	30 investor	65	DAU	IKU OPD	35 investor	110
		Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan penanaman modal	Kabupaten Lima Puluh Kota	3 kecamatan	45	DAU	IKU OPD	13 Kecamatan	260
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi, Jumlah investor, nilai realisasi Investasi	Kabupaten Lima Puluh Kota	160 milyar,3011 investor	137	DAU		1 Tahun	200
		Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Jumlah laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan	Kabupaten Lima Puluh Kota	19 laporan	25	DAU	IKU OPD	19 laporan	55
		Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Pemanfaatan aplikasi perizinan elektronik berbasis teknologi informasi dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku	Kabupaten Lima Puluh Kota	2 sistem aplikasi	55	DAU	IKU OPD	4 sistem aplikasi	70
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pengawasan investor pelaksanaan penanaman modal	Kabupaten Lima Puluh Kota	50perusahaan	57	DAU	IKU OPD	50 perusahaan	75

BAB V

PENUTUP

RENJA DPMPTSP Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA DPMPTSP Tahun 2016-2021 DAN RPJM Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota serta target dan Sasaran Pembangunan yang telah disusun dapat tercapai.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2020 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2020.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur DPMPTSP berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2019 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2020, dimana RENJA Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP, seluruh aparatur DPMPTSP secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2020.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2020 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencanapembangunan jangka panjang daerah , rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah..

5. Renja Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.